

UPAYA PENINGKATAN KEAMANAN DI DAERAH KHUSUS KUNJUNGAN WISATA DI INDONESIA (Hasil Penelitian)

1. Latar belakang

Pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut mutlak diperlukan situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif, sehingga tujuan Pembangunan Nasional melalui salah satu sektor pembangunan pariwisata dapat tercapai dengan baik.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa teror bom di Legian Bali yang menewaskan 187 orang dan 306 lainnya luka-luka menjadi peringatan kepada kita Bangsa Indonesia yang selama ini terlena oleh gemerlap euforia reformasi. Disamping itu teror ancaman bom pasca tragedi Bali yang terjadi di beberapa wilayah kota seperti di Jakarta, Yogyakarta, Makasar, Semarang, Medan dan lain-lain, yang membuat banyak wisatawan manca negara mengurungkan niatnya berkunjung ke Indonesia.

Demikian juga bencana alam yang terjadi di beberapa daerah pariwisata seperti bencana alam tanah longsor di bukit Lawang Sumatera Utara, tanah longsor di obyek wisata pemandian air panas di Pacet Jawa Timur yang telah

menelan banyak korban baik manusia maupun harta benda lainnya dan kemungkinan lain yang dapat mengganggu kenikmatan, keamanan serta kenyamanan tempat-tempat wisata lainnya.

Berangkat dari tujuan nasional dikaitkan dengan berbagai gangguan Kamtibmas sebagaimana disebutkan di atas, maka perlu diambil langkah-langkah guna mengatasi, mengantisipasi atau mengeliminir berbagai ancaman, gangguan hambatan dan tantangan, sehingga dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa aman baik melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri sendiri selaku instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan menjaga keamanan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, maupun dengan instansi lainnya.

2. Permasalahan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, masalah keamanan di dalam negeri sepenuhnya menjadi tanggung jawab Polri. Tidak terkecuali masalah keamanan di daerah wisata, baik yang terkait dengan keamanan pengunjung wisata, maupun

(termasuk tugas dinas), namun umumnya kegiatan bisnis (dinas) dilakukan terlebih dulu di tempat wisata, baru sesudah kegiatan utama selesai, sebagian besar waktunya digunakan untuk melakukan perjalanan wisata di tempat-tempat yang dikunjunginya.

Berdasarkan obyeknya, pariwisata dapat dibedakan menjadi wisata budaya dan wisata alam. Wisata budaya adalah kegiatan pariwisata yang menjadikan kegiatan budaya yang dilakukan oleh masyarakat sebagai suatu obyek untuk dinikmati, seperti tarian, tradisi yang ada di suatu daerah, dan tidak terkecuali, museum. Adapun dalam wisata alam, obyek yang dinikmati adalah alam semesta, seperti gunung, laut dan sejenisnya. Meskipun demikian dalam perkembangannya, dimasukkan pula jenis wisata belanja, yaitu kegiatan wisata yang dilakukan sambil berbelanja. Dalam kaitan itulah maka keberadaan Mall dan pusat-pusat pertokoan dimasukkan sebagai bagian dari obyek wisata.

Secara lebih luas, dilihat dari tujuannya, kegiatan pariwisata dapat dibedakan menjadi:

- a. Wisata budaya, yaitu kegiatan wisata yang dilakukan dengan motivasi untuk melihatseni dan budaya yang ada di suatu daerah.
- b. Wisata kesehatan, yaitu kegiatan pariwisata yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembuhkan suatu penyakit.

Termasuk dalam hal ini antara lain mandi di sumber air panas.

- c. Wisata perdagangan, yaitu pariwisata yang dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional atau internasional, seperti eksibisi, fair, expo, dan sejenisnya.
- d. Wisata olah raga, yaitu wisata yang bertujuan untuk melihat kegiatan olah raga yang berlangsung di suatu daerah, seperti formula one, pertandingan sepak bola, dan sejenisnya
- e. Wisata politik, yaitu yang tujuannya untuk melihat suatu peristiwa yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara, seperti peringatan hari kemerdekaan suatu negara, dan sejenisnya.
- f. Wisata agama, yaitu tujuannya untuk menyaksikan upacara keagamaan, seperti upacara Galungan dan Kuningan di Bali.

Terkait dengan pariwisata, maka muncul istilah industri pariwisata, yaitu suatu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, yang secara langsung atau tidak langsung dibutuhkan oleh wisatawan. Adapun yang termasuk dalam kebutuhan wisatawan adalah sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan mulai dari tahap persiapan, keberangkatan, tiba di tempat tujuan, tempat menginap, sampai kembalinya di tempat semula. Berkaitan dengan itu maka yang termasuk industri pariwisata adalah rumah makan, hotel,

perusahaan angkutan, travel biro, pemandu wisata dan pembuat serta penjual barang-barang souvenir.

b. Pentingnya Keamanan dalam Pariwisata

Di antara berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh seorang wisatawan dalam melakukan kegiatan pariwisata, satu hal yang tidak dapat diabaikan adalah kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan ini penting, karena dengan adanya rasa aman, maka wisatawan dapat melakukan kegiatannya dengan tenang.

Maslow menggolongkan jenis kebutuhan ini sebagai salah satu dari lima kebutuhan pokok manusia, yaitu yang disebut *safety or security needs*. Adapun lima kebutuhan pokok manusia itu berturut-turut meliputi: (1) *physiological or survival needs*, (2) *safety or security needs*, (3) *love or social needs*, (4) *esteem, status or ego needs*, dan (5) *self actualization needs*.

Menurut Maslow, lima kebutuhan pokok manusia tersebut merupakan urutan kebutuhan yang berdasarkan skala prioritas. Itu berarti bahwa kebutuhan fisik seperti kebutuhan makan dan minum itu merupakan kebutuhan utama, baru disusul dengan kebutuhan lainnya. Begitu pula, sesuai dengan urutan tersebut, kebutuhan rasa aman itu merupakan kebutuhan kedua sesudah kebutuhan fisik, tetapi kebutuhan yang utama dibanding tiga kebutuhan lain yang berada di urutan di bawahnya.

Dilihat dari segi ini, kebutuhan rasa aman itu bagi Maslow sangat penting, walaupun kurang penting dibandingkan dengan kebutuhan untuk makan dan minum. Itu sebabnya mengapa orang berani mengorbankan keselamatan jiwanya, hanya untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, karena kebutuhan makan dan minum itu dianggap lebih penting dari sekedar rasa aman, karena terkait dengan kebutuhan untuk hidup.

Jika kebutuhan yang lain dapat dipenuhi oleh industri pariwisata, maka kebutuhan yang terkait dengan rasa aman itu dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Polri. Hal itu karena sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, masalah yang terkait dengan keamanan di dalam negeri itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Polri. Begitu pula halnya dengan masalah ketertiban. Adapun yang dimaksud dengan keamanan dan ketertiban adalah suatu kondisi yang memberikan suasana kehidupan yang teratur, dan perasaan yang bebas dari rasa takut. Dengan demikian masyarakat diharapkan akan dapat melakukan aktivitasnya dengan tenang dan teratur.

6. Metodologi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan dilaksanakan di tujuh Polda, yaitu:

- 1) Polda Metro Jaya
- 2) Polda Jawa Barat
- 3) Polda DIY
- 4) Polda Bali
- 5) Polda NTB
- 6) Polda Sumatera Selatan
- 7) Polda Sulawesi Selatan

b. Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data lapangan dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

- 1) Mengisi kuesioner,
- 2) Wawancara, dan
- 3) *Focus group discussion* (FGD).

Responden dalam penelitian ini terdiri dari anggota masyarakat dan anggota Polri yang dipilih secara acak, mewakili kelompok-kelompok sosial yang ada. Jumlah responden untuk seluruh wilayah Polda sebanyak 1.895 orang, masing-masing terdiri dari unsur anggota Polri sebanyak 1.147 orang, dari unsur masyarakat sebanyak 621 orang, dan responden dari instansi terkait sebanyak 127 orang.

Responden masyarakat terdiri dari tokoh masyarakat, mahasiswa pelajar, LSM, wakil partai politik, pedagang, petani dan pegawai. Adapun diskusi kelompok dan wawancara selain melibatkan unsur - unsur tersebut juga melibatkan wakil-wakil dari instansi terkait, seperti Pemda dan Kodim.

Rincian jumlah responden di setiap wilayah Polda, dan latar belakang responden dapat dilihat dalam tabel berikut ini: (Tabel 1)

c. Pengolahan dan Analisis Data

1) Kualitatif

Pengolahan data kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh ke dalam aspek-aspek tertentu yang terkait dengan penelitian. Data yang sudah dikelompokkan kemudian dianalisa dengan cara analisa silang antara satu aspek dengan aspek yang lain.

Tabel 1

Jumlah responden di setiap wilayah Polda, dan identitas responden

NO	POLDA	RESPONDEN			JUMLAH
		POLRI	MASYARAKAT	INSTANSI TERKAIT	
1	METRO JAYA	162	67	13	242
2	JABAR	175	147	-	322
3	DIY	222	78	30	330
4	BALI	300	73	56	429
5	NTB	122	107	-	229
6	SUMSEL	145	57	-	202
7	SULSEL	121	92	28	241
	JUMLAH	1.147	621	127	1.895

2) Kuantitatif

Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan cara bertahap, mulai dari menyortir data yang dianggap tidak valid (mengedit data). Data yang sudah diedit kemudian dimasukkan dalam data base, dan dibuatkan tabulasi. Data yang sudah ditabulasi itu disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Adapun analisa data dilakukan dengan statistik deskriptif, yaitu dengan menggunakan distribusi frekuensi.

3) Teknik Analisa

Untuk mengklasifikasi variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya digunakan skala pengukuran. Dalam penelitian ini jenis skala pengukuran menggunakan skala Lickert (Drs. Riduwan, MBA) dimana suatu variabel dikelompokkan menjadi 4 katagori, yaitu :

a) Pernyataan Positif :

- (1) Tinggi nilai 4
- (2) Cukup nilai 3
- (3) Rendah nilai 2
- (4) Rendah sekali nilai 1

b) Pernyataan negatif

- (1) Tinggi nilai 1
- (2) Cukup nilai 2
- (3) Rendah nilai 3
- (4) Rendah sekali nilai 4

Yang akan diukur, dijabarkan menjadi sub variabel kemudian

sub variabel dijabarkan lagi menjadi indikator - indikator yang dapat diukur. Akhirnya indikator-indikator yang terukur dijadikan untuk membuat item instrumen yang berupa pertanyaan atau pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata.

7. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

- a. Kondisi keamanan di Tempat Wisata
- Kondisi keamanan di tempat - tempat wisata secara umum termasuk dalam kategori aman. Hal itu paling tidak tercermin pada persepsi lebih dari 80% responden yang diteliti . Dari hasil wawancara mendalam diketahui bahwa kondisi yang aman itu antara lain tercermin pada tidak adanya gangguan yang cukup berarti terhadap para pengunjung wisata, maupun terhadap benda - benda wisata. Selain itu, kondisi yang aman itu juga karena adanya kesadaran yang cukup tinggi dari pengunjung wisata, untuk memelihara keamanan dan ketertiban di daerah wisata.

Kondisi keamanan yang seperti itu hampir sama di setiap Polda, kecuali di wilayah Polda Metro Jaya, NTB dan Jawa Barat. Jika di wilayah Polda yang lain respondennya cenderung memiliki persepsi bahwa di daerah wisata kondisinya aman

sekali, maka di tiga wilayah Polda tersebut respondennya cenderung memiliki persepsi bahwa di daerah wisata kondisinya aman, jadi satu tingkat di bawah empat Polda yang lain. (Tabel kondisi keamanan). (Tabel 2)

jalan - jalan yang menuju ke lokasi wisata. Gangguan itu terutama adalah dalam bentuk pemalakan, yang dilakukan oleh preman. Namun hal itu tidak terjadi di semua tempat, tetapi hanya di tempat - tempat tertentu yang biasanya tidak

Tabel 2
Kondisi keamanan di daerah wisata, menurut Polda

NO	POLDA	TINGKAT KEAMANAN				JUMLAH
		TIDAK AMAN	KURANG AMAN	AMAN	AMAN SEKALI	
1	METRO JAYA	3	2	46	36	87
2	JABAR	4	5	83	64	156
3	DIY	1	8	77	128	213
4	BALI	1	8	75	220	303
5	NTB	2	2	54	50	108
6	SUMSEL	3	8	92	98	201
7	SULSEL	1	15	41	123	180
	JUMLAH	13	48	468	719	1.248
	%	1,04	3,84	37,5	57,61	100,00

Dari hasil wawancara mendalam dengan para pengunjung wisata, masyarakat umum dan dengan para petugas lapangan, menunjukkan bahwa walaupun di daerah wisata kondisinya tergolong aman/aman sekali, namun bukan berarti tidak ada gangguan keamanan. Secara umum gangguan keamanan itu terwujud pada adanya pencopetan yang kadang masih terjadi di tempat - tempat wisata. Pencopetan itu biasanya terjadi pada saat - saat tertentu yang ramai pengunjung.

Gangguan terhadap pengunjung wisata umumnya lebih banyak terjadi di luar lokasi wisata, yaitu di

ada petugas pengamanan.

Begitu pula tindak negatif dari masyarakat setempat yang mere-sahkan wisatawan seperti mabuk - mabukan, perjudian, juga masih dijumpai di beberapa tempat wisata. Bahkan di tempat wisata tertentu, juga terdapat praktek tindakan asusila, yang dilakukan oleh beberapa PSK. Menurut masyarakat, hal itu terjadi karena pengamanan wisata masih terbatas pada pengamanan fisik, untuk mencegah dan mengatasi permasalahan gangguan keamanan. Adapun permasalahan yang terkait dengan dampak moralitas kurang diantisipasi, dan hanya menyerahkan

masalah itu pada ulama.

Keberadaan pedagang asongan yang tidak tertib masih dikeluhkan oleh pengunjung di beberapa daerah wisata, karena dianggap mengganggu kenyamanan pengunjung. Karena itu masyarakat umumnya mengharapkan agar keberadaan pedagang asongan tetap dipertahankan, tetapi ketertibannya perlu dijaga. Untuk itu diperlukan pembinaan secara rutin terhadap pedagang asongan, yang melibatkan unsur-unsur terkait, baik dari Polri maupun dari Dinas Pariwisata.

Keberadaan pemandu wisata memang sangat dibutuhkan di tempat-tempat wisata. Meskipun demikian di beberapa daerah kadang dianggap merugikan wisatawan. Tidak jarang mereka bekerjasama dengan pedagang dengan memasang tarif yang tinggi untuk barang cinderamata, dengan maksud untuk mendapatkan *fee* yang besar dari pedagang.

Di beberapa lokasi wisata yang ramai pengunjung, petugas parkir juga sering meminta uang parkir yang dianggap terlalu tinggi, melebihi yang ditentukan oleh Pemda. Hal itu kadang menimbulkan keributan kecil antara petugas parkir dengan pengunjung wisata.

Perilaku aparat kadang juga dianggap kurang mendukung terciptanya kondisi yang menunjang perkembangan wisata. Bus - bus pariwisata dari luar kota sering dilarang masuk kota dengan

berbagai alasan. Hal itu dianggap menyulitkan pengunjung wisata, terutama jika lokasi wisata berada di tengah kota. Informasi dari Departemen Perhubungan di beberapa daerah menunjukkan bahwa sebetulnya bus - bus wisata diperbolehkan masuk ke dalam kota. Adapun yang tidak boleh masuk ke dalam kota adalah bus-bus yang dicarter untuk kepentingan wisata, karena masih merupakan bus umum. Meskipun demikian, bus umum yang dicarter untuk keperluan wisata itu tetap boleh masuk ke dalam kota, jika sudah ada ijin.

Dengan demikian penangkapan bus wisata yang masuk ke dalam kota itu menimbulkan dua pertanyaan besar : apakah sosialisasi dari Dinas perhubungan setempat yang kurang jelas, ataukah karena Polantas sengaja mencari kesempatan dengan pura - pura tidak mengetahui ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, jika banyak informasi yang menyebutkan bahwa bus - bus wisata itu umumnya baru diijinkan masuk, setelah membayar sejumlah uang yang disebut uang koordinasi, maka nampaknya kemungkinan kedua yang terjadi.

Kebiasaan yang buruk dari petugas juga dianggap sebagai sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung wisata, yaitu berupa penilangan kendaraan yang berasal dari luar kota yang salah jalan, yang justru berakhir dengan denda damai. Menurut masyarakat, mestinya kesalahan

yang demikian itu tidak harus diberi sanksi berupa penilangan, melainkan cukup diberi penjelasan.

Adanya anggota Polisi Pengamanan Wisata yang mengantar pengunjung ke kios - kios penjual souvenir di beberapa lokasi wisata juga dikeluhkan masyarakat. Hal itu karena dari segi etika profesi dianggap kurang baik, karena ada indikasi bahwa tujuannya bukan untuk menjaga keamanan tetapi untuk memperoleh komisi dari penjual barang.

Sopir angkutan umum dan para tukang becak di beberapa tempat juga sering dianggap belum mendukung pengembangan wisata di daerah itu. Upaya untuk memperlakukan penumpang dengan setengah memaksa, mengakibatkan kurang nyamannya pengunjung wisata. Selain itu, carter kendaraan menuju ke tempat wisata sering dipungut ongkos yang lebih mahal, di luar kewajaran. Lebih-lebih jika pengunjung itu berasal dari wisatawan manca negara.

Beberapa anak sekolah yang masuk tempat wisata pada jam sekolah, yang terindikasi dengan seragam yang dipakai, cukup meresahkan para orang tua. Hal itu dianggap masih belum menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian. Karena itu diharapkan agar ada koordinasi antara pihak sekolah, Polri dan pengelola wisata, dalam menangani masalah itu.

b. Upaya Peningkatan Pengamanan

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Polri untuk mengamankan daerah wisata, mulai dari kedatangan wisatawan di wilayahnya, tempat menginap, lokasi wisata, sampai dengan kembalinya wisatawan ke daerah asal mereka.

Untuk menjaga keamanan wisatawan di lokasi kedatangan dan kepulangan, Polri menempatkan petugas mereka di pelabuhan dan di bandara. Akan tetapi, masih ada beberapa bandara yang menggunakan fasilitas TNI, sehingga Polri kurang dapat mengamankan secara optimal.

Walaupun aparat Kepolisian tidak dapat mengawasi secara langsung kondisi keamanan di bandara, namun mereka melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam pengamanan bandara, yaitu dengan pihak imigrasi dan dengan Satpam bandara. Dengan demikian setiap ada permasalahan yang terkait dengan kondisi kamtibmas di bandara, akan dapat diketahui oleh petugas dengan cepat. Khusus di Bali, pengamanan di bandara dilakukan oleh Polisi Pariwisata.

Adapun pengamanan wisatawan di hotel-hotel tidak dilakukan secara langsung oleh Polri, melainkan dilakukan oleh para Satpam Hotel. Hal itu karena keterbatasan personel yang dimiliki oleh Polri. Untuk itu, umumnya pihak Polri di kewilayahan menetapkan standard pengamanan yang harus dipenuhi

oleh pihak hotel, yang dibedakan antara standard pengamanan untuk hotel berbintang dan untuk hotel kelas melati. Untuk mengetahui apakah standard pengamanan yang diberlakukan itu dipenuhi oleh hotel, petugas dari Kepolisian melakukan monitoring ke hotel-hotel, dan memberikan teguran pada manajemen hotel yang belum melakukan pengamanan sebagaimana standard yang telah ditentukan.

Untuk pengamanan di tempat wisata, dalam pelaksanaannya cenderung dibedakan menjadi dua, yaitu: tempat wisata yang banyak dikunjungi, dan tempat wisata yang kurang dikunjungi, kecuali pada hari-hari tertentu. Untuk tempat-tempat wisata yang banyak dikunjungi, biasanya di tempat itu terdapat Pos Polisi. Dengan demikian setiap hari terdapat anggota Polri yang berjaga di tempat tersebut. Agak berbeda dengan di Bali, hampir semua tempat wisata terdapat Pos Polisi. Hal itu karena hampir semua tempat wisata di Bali umumnya banyak dikunjungi wisatawan, walaupun kadarnya berbeda.

Penjagaan di tempat wisata untuk setiap *shift* biasanya terdiri dari dua orang. Meskipun demikian di tempat-tempat tertentu yang ramai pengunjung, setiap penjagaan dapat dilakukan oleh empat orang. Hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang menunjukkan pengakuan responden dari anggota

Polri tentang berapa orang yang bertugas jaga setiap melakukan penjagaan di tempat wisata. (Tabel 3)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa prosentase terbesar responden mengakui bahwa setiap kali melakukan tugas jaga, jumlah personel yang bertugas adalah dua orang. Jumlah mereka yang mengatakan seperti itu sekitar 35%. Prosentase terbesar responden memang mengatakan bahwa jumlah petugas jaga itu sudah mencukupi. Namun secara keseluruhan, yang menyatakan bahwa jumlah itu kurang mencukupi dan belum mencukupi lebih besar. (Tabel 4)

Masalah mencukupi atau tidak mencukupinya petugas jaga untuk setiap *shift*nya memang relatif, tergantung kebutuhan. Untuk tempat wisata yang kecil, jumlah dua orang mungkin dianggap sudah mencukupi. Tetapi untuk tempat wisata yang luas, jumlah empat orang mungkin dianggap tidak mencukupi. Untuk itu Polri perlu melakukan kajian, berapa orang petugas yang ideal untuk menjaga tempat wisata setiap *shift*nya, dibandingkan dengan luas lokasi dan jumlah pengunjungnya. Menurut pengakuan para responden dari anggota Polri, dalam mengamankan tempat wisata umumnya mereka memiliki prioritas penjagaan.

Pada tabel prioritas penjagaan di bawah ini, dapat dilihat bahwa jumlah mereka yang berpendapat bahwa ada prioritas penjagaan di

Tabel 3
Jumlah personel yang bertugas setiap kali berjaga

NO	POLDA	JUMLAH ORANG					Tidak jawab	JML
		1	2	3	4	>4		
1	METRO JAYA	0	2	5	1	4	1	13
2	JABAR	6	6	2	2	0	1	17
3	DIY	11	17	11	8	0	3	50
4	BALI	10	73	17	35	27	22	184
5	NTB	0	2	10	1	0	0	13
6	SUMSEL	12	15	2	10	0	5	44
7	SULSEL	9	9	1	1	0	4	24
	JUMLAH	48	124	48	58	31	36	345
	%	13,91	35,94	13,91	16,81	8,98	10,43	100,00

tempat wisata itu sangat besar, yaitu sekitar 75%. Hal itu berlaku untuk setiap Polda. (Tabel 5)

Adapun prioritas penjagaan menurut pengakuan mereka terutama adalah keamanan dan keselamatan pengunjung wisata. Untuk tempat-tempat wisata tertentu, seperti museum, keamanan

dari obyek wisata juga menjadi prioritas penjagaan aparat Kepolisian.

Penjagaan di tempat - tempat wisata yang relatif kurang pengunjung, umumnya hanya dilakukan selama empat jam atau kurang dalam satu hari, tergantung pada ramainya pengunjung pada

Tabel 4
Tercukupinya jumlah petugas jaga

NO	POLDA	CUKUPI	KURANG CUKUP	BELUM CUKUP	TJ	JML
1	METRO JAYA	4	2	6	1	13
2	JABAR	4	7	5	1	17
3	DIY	19	11	19	1	50
4	BALI	76	34	66	8	184
5	NTB	9	2	2	0	13
6	SUMSEL	24	7	11	2	44
7	SULSEL	16	3	4	1	24
	JUMLAH	152	66	113	14	345
	%	44,06	19,13	32,75	4,05	100,00

Tabel 5
Prioritas penjagaan di tempat wisata, menurut Polda

NO	POLDA	ADA	TIDAK ADA	TJ	JUMLAH
1	METRO JAYA	9	3	1	13
2	JABAR	14	2	1	17
3	DIY	36	12	2	50
4	BALI	148	24	12	184
5	NTB	13	0	0	13
6	SUMSEL	26	13	5	44
7	SULSEL	16	7	1	24
	JUMLAH	262	61	22	345
	%	75,94	17,68	6,37	100,00

hari itu. Meskipun demikian, untuk lokasi wisata yang banyak pengunjung, banyak penjagaan yang dilakukan di atas 8 jam.

Sekitar 36% responden mengaku setiap kali melakukan tugas jaga lamanya adalah di atas 8 jam. Meskipun demikian, bagian terbesar responden mengakui setiap

bertugas jaga di tempat wisata hanya kurang dari empat jam, empat sampai enam jam, atau paling lama delapan jam.

Dalam melakukan penjagaan di tempat wisata umumnya terdapat pergantian tugas jaga setiap harinya. Meskipun demikian, jumlah mereka yang menyatakan bahwa

Tabel 6
Senjata yang digunakan pada saat berjaga di lokasi wisata, menurut Polda

NO	POLDA	TDK MEMBAWA SENJATA	SENPI	TONGKAT	SENPI DAN TONGKAT	TJ	JML
1	METRO JAYA	7	1	1	3	1	13
2	JABAR	1	5	4	5	2	17
3	DIY	44	4	0	0	2	50
4	BALI	116	21	24	12	11	184
5	NTB	2	10	0	0	1	13
6	SUMSEL	23	4	11	3	3	44
7	SULSEL	8	8	4	3	1	24
	JUMLAH	201	53	44	26	21	345
	%	58,26	15,36	12,75	7,54	6,08	100,00

tidak ada pergantian tugas jaga cukup besar, yaitu sekitar 37%.

Dalam melakukan penjagaan di tempat wisata, sebagian besar responden mengatakan bahwa samasekali tidak membawajenjata. Memang sebagian ada yang membawajenjata api dalam bentuk pistol, namun jumlahnya tidak banyak. Begitu pula yang hanya bersenjatakan pentungan.

Tabel yang tersebut di bawah ini, menunjukkan bahwa jumlah yang tidak membawa senjata jika bertugas di tempat wisata hampir mencapai 60%. (Tabel 6)

Selain tidak dilengkapi senjata, banyak petugas yang masih belum dilengkapi dengan alat komunikasi, pada saat bertugas di tempat wisata.

Jumlah petugas yang berjaga di tempat wisata yang belum dilengkapi sarana komunikasi sekitar 35%. Kondisi seperti itu hampir sama di setiap Polda.

Terkait dengan penugasan jaga di tempat wisata itu, yang penting untuk diperhatikan adalah adanya pengawasan terhadap petugas jaga. Pengawasan itu penting, agar para petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan kesungguhan hati, dan tidak melakukan tindakan yang menyimpang dalam bertugas. Berkaitan dengan itu, bahwa sekitar 89% responden mengatakan bahwa ada pengawasan terhadap petugas jaga. Adapun pengawasan itu umumnya dilakukan dalam bentuk patroli.

Untuk tempat wisata yang tidak banyak dikunjungi, di tempat itu tidak ada Pos Polisi. Meskipun demikian penjagaan tetap dilakukan, terutama pada hari-hari tertentu yang banyak pengunjung, seperti hari libur dan hari raya.

Selain penjagaan pada hari tertentu yang banyak pengunjung, pengamanan di lokasi wisata yang

Tabel 7
Jumlah patroli di tempat wisata dalam satu hari

NO	POLDA	1 KALI	2 KALI	DIATAS 2 KALI	TJ	JUMLAH
1	METRO JAYA	1	0	11	1	13
2	JABAR	3	6	3	5	17
3	DIY	19	12	1	18	50
4	BALI	37	38	98	11	184
5	NTB	4	9	0	0	13
6	SUMSEL	15	16	4	9	44
7	SULSEL	11	0	8	5	24
	JUMLAH	86	76	134	49	345
	%	24,93	22,02	38,85	14,20	100,00

tidak banyak pengunjungnya biasanya dilakukan dengan sistem patroli, yang diadakan setiap hari. Meskipun demikian patroli tidak dilakukan khusus untuk mengamankan tempat wisata, melainkan untuk seluruh wilayah. Hanya jika kebetulan ada tempat wisata yang menjadi bagian dari jalur yang dilalui, maka patroli akan menyempatkan singgah di lokasi itu. Menurut pengakuan para responden, dalam satu hari biasanya patroli dilakukan di atas dua kali. (Tabel 7)

Adapun kendaraan patroli yang digunakan sebagian besar adalah berupa sepeda motor. Meskipun demikian yang menggunakan mobil juga cukup banyak, yaitu sekitar 35,94%. (Tabel 8)

Di wilayah Polda Bali, pengamanan tempat wisata, terutama di tempat-tempat yang banyak dikunjungi wisatawan, dilakukan oleh Polisi Pariwisata. Adapun di

tempat-tempat yang kurang banyak pengunjung, dilakukan oleh anggota Samapta yang ditugaskan di Pos Polisi yang ada di lokasi.

Adapun di wilayah Polda yang lain, walaupun terdapat Polisi Pariwisata, namun pengamanan umumnya dilakukan oleh anggota Samapta. Hal itu karena terbatasnya anggota Polisi Pariwisata. Masyarakat, begitu pula para anggota Polri, mengharapkan agar pengamanan di semua tempat wisata sebaiknya dilakukan oleh Polisi Pariwisata. Hal itu karena kesan keramahan yang ditampilkan oleh Polisi Pariwisata dianggap lebih menonjol, terkait dengan pakaian seragam yang dikenakannya.

Diharapkan pula agar keberadaan Polisi Pariwisata bukan hanya di Polda, melainkan juga di setiap Polres yang ada daerah wisatanya. Bahkan seandainya di Polda tidak ada Polisi pariwisatanya, tetapi jika di wilayah Polres atau

Tabel 8
Jenis kendaraan untuk patroli

NO	POLDA	MOBIL	MOTOR	SEPEDA	TJ	JUMLAH
1	METRO JAYA	8	4	0	1	13
2	JABAR	6	10	0	1	17
3	DIY	22	24	0	4	50
4	BALI	63	80	36	5	184
5	NTB	9	2	0	2	13
6	SUMSEL	5	27	4	8	44
7	SULSEL	11	10	2	1	24
	Jumlah	124	157	42	22	345
	%	35,94	45,51	12,17	6,37	100,00

Polsek terdapat lokasi wisata yang cukup menonjol, maka diharapkan agar di Polres atau Polsek itu terdapat Polisi Pariwisata, yang dapat ditugaskan untuk melakukan penjagaan di lokasi wisata.

Begitu pula setiap Pos Polisi yang ada di tempat wisata, diharapkan agar anggotanya terdiri dari Polisi Pariwisata. Hal itu sangat ditekankan, karena seperti di Bali, walaupun di tempat-tempat yang ramai pengunjung pengamanannya sudah dilakukan oleh Polisi Pariwisata, namun anggota Pos Polisi yang ditugaskan di tempat wisata yang kurang banyak pengunjung umumnya dilakukan oleh anggota Samapta. Dengan ditempatkannya Polisi Pariwisata untuk melakukan pengamanan di tempat-tempat wisata, diharapkan mereka dapat melayani wisatawan dengan lebih baik, karena sebagai Polisi Pariwisata mereka diharapkan

tidak hanya menjaga kondisi kamtibmas di sekitar lokasi wisata, melainkan dapat berfungsi sebagai pemandu wisata. Untuk keperluan itu maka anggota Polisi Pariwisata perlu memiliki keahlian spesifik. Selain keahlian yang dimiliki oleh anggota Samapta, anggota Polisi Pariwisata sebaiknya memiliki pemahaman yang baik tentang kepariwisataan yang ada di daerahnya, paling tidak tentang kepariwisataan di tempat dia ditugaskan.

c. Peran masyarakat dan Pemda

Di beberapa tempat wisata, umumnya masyarakat terlibat aktif dalam pengamanan wisata. Grafik 6 paling tidak menunjukkan hal itu. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa lebih dari 78% responden menyatakan bahwa masyarakat telah ikut berpartisipasi dalam pengamanan daerah wisata.

Kondisi yang sama juga terjadi

Tabel 9
Partisipasi masyarakat
dalam pengamanan wisata, menurut Polda

NO	POLDA	YA	TIDAK	TIDAK TAHU	JUMLAH
1	METRO JAYA	54	10	1	65
2	JABAR	54	12	3	69
3	DIY	62	7	3	72
4	BALI	57	15	3	75
5	NTB	29	4	3	36
6	SUMSEL	50	11	1	62
7	SULSEL	55	23	5	83
	Jumlah	361	82	19	462
	%	78,13	17,75	4,11	100,00

di setiap wilayah Polda yang diteliti. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa di setiap wilayah Polda, semua responden cenderung menyatakan bahwa bahwa masyarakat telah ikut berpartisipasi dalam pengamanan daerah wisata. (Tabel 9)

Partisipasi masyarakat dalam pengamanan wisata itu umumnya tidak dilakukan setiap hari, melainkan pada hari-hari tertentu yang banyak pengunjung wisata. Meskipun demikian, pada umumnya partisipasi masyarakat itu masih terbatas pada penyediaan dan penjagaan tempat parkir, untuk mengamankan kendaraan yang diparkir oleh pengunjung wisata. Hal itu sedikit berbeda untuk wilayah Polda Bali. Di wilayah ini, beberapa tempat wisata justru dikelola oleh desa adat, dan pengamanannya dilakukan oleh *pecalang*. Dalam praktiknya pengamanan dilakukan secara bergantian oleh para *pecalang*. Selain itu, beberapa tempat wisata di Bali juga dikelola oleh yayasan, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengamanannya.

Di wilayah Polda Metro Jaya, partisipasi masyarakat itu diwujudkan dalam bentuk organisasi pengamanan, yang diberi nama "Citra Bhayangkara". Walaupun organisasi ini tidak mengkhususkan diri dalam mengamankan tempat-tempat wisata, namun apa yang dilakukan memiliki efek dalam pengamanan tempat wisata.

Para anggota organisasi ini secara bergantian melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang ada di masyarakat, dan melaporkan ke Polres segala hal yang dianggap dapat mengganggu kondisi kamtibmas. Walaupun beberapa tempat wisata melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengamanannya, namun mereka tetap melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian, jika terjadi gangguan keamanan. Karena itulah maka keberadaan *pecalang* dan partisipasi masyarakat yang lain dalam mengamankan daerah wisata dirasakan sangat membantu aparat Kepolisian dalam pengamanan tempat wisata.

Suatu hal yang ironis justru terjadi pada tempat wisata besar yang dikelola secara profesional, seperti Ancol di Jakarta, yang dirasakan kurang melibatkan partisipasi masyarakat sekitarnya dalam pengamanannya. Hal itu karena pengelola mengelola wilayahnya secara profesional, dengan merekrut Satpam yang berasal dari luar kawasan Ancol untuk mengamankannya. Selain partisipasi masyarakat, umumnya pengamanan wisata di daerah-daerah juga dibantu oleh aparat Pemda, terutama dari Dinas Pariwisata. Selain itu, aparat dari Dinas Ketertiban Umum juga sering membantu mengamankan daerah wisata. Tabel tersebut dibawah ini menunjukkan pendapat responden tentang aparat Pemda yang ditu-

Tabel 10
Aparat pemda yang ditugaskan untuk pengamanan
di daerah wisata

NO	POLDA	DINAS PA-RIWISATA	TIBUM	KEDUANYA	TDK TAHU / TDK JW B	JML
1	METRO JAYA	5	2	0	2	9
2	JABAR	17	4	2	7	30
3	DIY	5	2	8	7	22
4	BALI	11	18	9	18	56
5	NIB	8	4	3	4	19
6	SUMSEL	14	6	2	6	28
7	SULSEL	15	3	1	8	27
	JUMLAH	75	39	25	52	191
	%	39,27	20,42	13,08	27,22	100,00

gaskan untuk pengamanan di daerah wisata, yaitu lebih dari 30% adalah dari Dinas Pariwisata. (Tabel 10)

Selain keberadaan petugas dari Dinas Pariwisata untuk membantu ketertiban dan keamanan di tempat wisata, bantuan lain dari Pemda dalam pengamanan tempat wisata, pada umumnya terwujud dalam bentuk pelatihan - pelatihan, bekerjasama dengan Dinas Pariwisata. Akan tetapi, pelatihan itu umumnya masih terbatas pada upaya peningkatan pelayanan terhadap pengunjung pariwisata.

Dukungan lain, seperti dukungan anggaran dalam APBD, pada umumnya belum ada. Hal itu bukan berarti bahwa pihak Pemda kurang menaruh perhatian pada kondisi keamanan di tempat-tempat wisata, tetapi karena kurang koordinasinya antara Polri dengan Pemda.

Menurut informasi yang diterima, bisa saja Pemda menganggarkan untuk pengamanan daerah wisata, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Polri. Namun hal itu dapat dilakukan apabila ada proposal rinci yang diajukan oleh instansi Polri, yang menjelaskan tentang jumlah dana yang dibutuhkan untuk biaya pengamanan, dan posisi dana yang dimiliki. Transparansi tentang itu perlu dilakukan, dengan maksud agar duplikasi anggaran antara Pemda dengan Polri (dalam hal ini Polres) dapat dihindari.

d. Kendala Pengamanan Pariwisata

Beberapa kendala dihadapi oleh Polri dalam pengamanan daerah wisata. Berkaitan dengan personel, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan ada kendala untuk penugasan di tempat-tempat

Tabel 11
Kendala personel untuk penugasan jaga
di tempat wisata, menurut Polda

NO	POLDA	ADA	TIDAK ADA	TIDAK JAWAB	JML
1	METRO JAYA	20	5	0	25
2	JABAR	23	14	1	38
3	DIY	40	10	1	51
4	BALI	12	0	0	12
5	NTB	13	0	0	13
6	SUMSEL	23	5	1	29
7	SULSEL	45	5	1	51
	JUMLAH	176	39	4	219
	%	80,36	17,81	1,82	100,00

wisata.

Pandangan yang sama dimiliki oleh sebagian besar responden di setiap Polda yang diteliti. Tabel di bawah ini, menunjukkan bahwa di setiap Polda, sebagian besar responden cenderung menyatakan bahwa ada kendala personel dalam kaitannya dengan pengamanan wisata. (Tabel 11)

Hasil wawancara mendalam diketahui bahwa kendala itu terutama terkait dengan jumlah personel yang tidak memadai. Di beberapa daerah yang sudah memiliki Polisi Pariwisata, jumlahnya sangat tidak memadai, dan masih jauh di bawah yang seharusnya. Begitu pula daerah yang belum memiliki Polisi Pariwisata, jumlah petugas yang ditugaskan untuk pengamanan daerah wisata umumnya juga masih kurang memadai. Untuk mengatasi hal

tersebut, maka para responden mengharapkan agar polisi yang ditugaskan untuk mengamankan tempat wisata diangkat sebagai Polisi Pariwisata, dan diberi seragam Polisi Pariwisata.

Pengamanan wisata adalah meliputi pengamanan wisatawan sejak kedatangannya, di tempat menginap, di tempat wisata, sampai dengan mereka kembali meninggalkan wilayah itu. Karena itu dengan terbatasnya jumlah petugas, maka Polri kesulitan untuk memantau di keseluruhan tempat tersebut dengan baik. Di hotel-hotel misalnya, Polri terpaksa mengandalkan pada Satpam hotel untuk mengamankan wisatawan, walaupun dengan tingkat keahlian yang minim. Memang benar bahwa di beberapa satuan kewilayahan telah menetapkan standard pengamanan di hotel - hotel dan tempat-

tempat tertentu yang ramai pengunjung. Namun untuk memonitor apakah standard yang ditetapkan itu sudah dipenuhi, maka karena keterbatasan petugas, Polri juga kesulitan untuk melakukannya dengan baik.

Untuk daerah - daerah yang memiliki tempat-tempat wisata yang cukup besar dan selalu ramai pengunjung, hal itu cukup menyulitkan petugas untuk dapat mengamankan tempat wisata dengan optimal. Karena itu banyak responden yang mengusulkan agar di daerah yang sudah ada Polisi Pariwisata, maka semua anggota Polri yang ditugaskan di tempat-tempat wisata sebaiknya diangkat menjadi Polisi Pariwisata.

Keahlian yang dimiliki oleh para petugas pengamanan wisata juga masih kurang mendukung. Sebagai aparat yang mengamankan daerah wisata, mereka dituntut untuk memiliki ketrampilan dalam pelayanan wisata. Selain itu, untuk tempat-tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing, mereka juga dituntut untuk menguasai bahasa asing, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa penguasaan bahasa asing itu masih merupakan barang langka, sehingga sebagian besar aparat yang ditugaskan mengamankan daerah wisata belum bisa berkomunikasi dengan bahasa asing, tidak terkecuali para Polisi Pariwisata. Karena itu di masa yang

akan datang, penguasaan bahasa asing oleh para Polisi Pariwisata maupun anggota Polri yang lain yang ditugaskan untuk pengamanan tempat wisata, perlu digalakkan. Terutama bagi mereka yang bertugas di tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh orang asing. Kendalanya adalah bukan karena mereka tidak mau belajar bahasa asing, tetapi lebih karena tidak memiliki dana untuk itu. Selain itu, karena penguasaan demikian itu merupakan tuntutan tugas, maka sudah selayaknya jika biaya untuk kursus bahasa asing ditanggung oleh pemerintah. Mengingat biaya yang cukup besar, maka Polri di satuan kewilayahan dapat bekerjasama dengan Pemda atau dengan lembaga - lembaga kursus / pendidikan bahasa asing di wilayahnya untuk meningkatkan keahlian anggotanya dalam berbahasa asing.

Berkaitan dengan sarana dan prasarana yang tersedia, sebagian besar responden juga menyatakan ada kendala untuk pengamanan di tempat-tempat wisata. Hal yang sama terjadi di setiap Polda yang diteliti. Di masing-masing Polda, sebagian besar responden juga menyatakan bahwa terdapat kendala yang berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk pengamanan daerah wisata. **(Tabel 12)**

Hasil wawancara mendalam diketahui bahwa kendala sarana dan prasarana itu terutama terkait pada alat komunikasi. Di semua daerah yang diteliti, mereka sangat

Tabel 12
Kendala sarana dan prasarana untuk penjagaan di tempat wisata,
menurut Polda

NO	POLDA	ADA	TIDAK ADA	TIDAK JAWAB	JML
1	METRO JAYA	21	4	0	25
2	JABAR	23	14	1	38
3	DIY	44	7	0	51
4	BALI	12	0	0	12
5	NTB	13	0	0	13
6	SUMSEL	23	5	1	29
7	SULSEL	48	2	1	51
	JUMLAH	184	32	3	219
	%	84,01	14,61	1,37	100,00

kekurangan alat komunikasi.

Akibatnya dalam satu regu jaga, hanya terdapat satu atau paling banyak dua alat komunikasi. Hal itu tentu saja tidak efektif untuk pengamanan, karena menyulitkan koordinasi. Pada grafik 9 dapat dilihat bahwa sebagian besar

responden menyatakan ada kendala terkait dengan alat komunikasi untuk pengamanan tempat wisata. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa kendala alat komunikasi itu ada di setiap wilayah Polda. Untuk seluruh Polda yang diteliti, kendala alat komunikasi itu diakui oleh

Tabel 13
Kendala alat komunikasi untuk
pengamanan tempat wisata, menurut Polda

NO	POLDA	ADA	TIDAK ADA	TIDAK JAWAB	JUMLAH
1	METRO JAYA	21	4	-	25
2	JABAR	19	17	2	38
3	DIY	42	9	-	51
4	BALI	11	1	-	12
5	NTB	7	5	1	13
6	SUMSEL	17	11	1	29
7	SULSEL	38	13	-	51
	JUMLAH	155	60	4	219
	%	70,77	27,39	1,83	100,00

Tabel 14
Kendala kendaraan bermotor untuk patroli di tempat wisata

NO	POLDA	ADA	TIDAK ADA	TIDAK JAWAB	JML
1	METRO JAYA	20	5	0	25
2	JABAR	18	19	1	38
3	DIY	33	18	0	51
4	BALI	11	1	0	12
5	NTB	9	3	1	13
6	SUMSEL	20	7	2	29
7	SULSEL	42	7	2	51
	JUMLAH	153	60	6	219

sekitar 70% responden. (Tabel 13)

Selain alat komunikasi, sarana dan prasarana yang terkait dengan kendaraan bermotor untuk patroli juga dirasakan masih kurang oleh para responden. Jumlah mereka yang berpandangan bahwa ada kendala dalam kaitannya dengan hal itu cukup besar, yaitu sekitar 69%. (Tabel 14)

Berkaitan dengan kendala

kendaraan bermotor untuk patroli di tempat wisata, banyak anggota Polri yang menggunakan motor milik pribadi untuk melakukan patroli. Hal itu tentunya cukup menyulitkan petugas, karena biaya perbaikan motor jika terjadi kerusakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Di beberapa tempat Polri memang sudah memiliki kendaraan untuk patroli di tempat wisata. Akan

Tabel 15
Kendala dana untuk kegiatan patroli di tempat wisata

NO	POLDA	ADA	TIDAK ADA	TJ	JML
1	METRO JAYA	19	6	0	25
2	JABAR	22	13	3	38
3	DIY	35	16	0	51
4	BALI	11	1	0	12
5	NTB	10	3	0	13
6	SUMSEL	17	9	3	29
7	SULSEL	43	7	1	51
	JUMLAH	157	55	7	219

tetapi, kondisinya umumnya tidak memenuhi syarat, karena selain usia kendaraan yang sudah tua, kondisi fisik kendaraan juga sudah tidak layak jika digunakan untuk melakukan patroli.

Bukan hanya masalah kendaraan, masalah dana untuk kegiatan patroli di tempat wisata juga dirasakan sebagai kendala oleh sebagian besar responden anggota Polri. Jumlah mereka yang menyatakan bahwa demikian sekitar 71%. (Tabel 15)

Para responden mengaku tidak tahu, apakah tersedia dana untuk melakukan patroli di tempat wisata atau tidak. Yang diketahui adalah umumnya mereka tidak pernah menerimanya, terutama yang melakukan patroli menggunakan kendaraan pribadi. Mereka cenderung menggunakan uang pribadi untuk membeli bahan bakar untuk

keperluan patroli. Dengan cara yang demikian maka dikhawatirkan dapat melemahkan semangat kerja anggota.

Berkaitan dengan sarana dan prasarana, seragam dinas untuk Polisi Pariwisata juga dianggap masih belum memadai. Pada umumnya setiap anggota Polisi Pariwisata baru memiliki satu stel seragam dinas. Hal itu tentunya tidak mencukupi jika harus digunakan setiap harinya. Begitu pula seragam untuk Polisi Pariwisata di Bali misalnya, juga belum diberi oleh Dinas. Beruntung mereka mendapatkan bantuan dari pengusaha untuk memperolehnya.

Berkaitan dengan masalah koordinasi di lingkungan internal Polri untuk pengamanan daerah wisata, sebagian besar responden mengakui bahwa tidak ada ken-

Tabel 16
Kendala koordinasi instansi terkait
untuk pengamanan daerah wisata

NO	POLDA	ADA	TIDAK ADA	TIDAK JAWAB	JUMLAH
1	METRO JAYA	7	17	1	25
2	JABAR	8	28	2	38
3	DIY	14	36	1	51
4	BALI	6	6	-	12
5	NTB	5	8	-	13
6	SUMSEL	9	18	2	29
7	SULSEL	20	30	1	51
	JUMLAH	69	143	7	219

dala. Baik itu koordinasi di lingkungan satuan kewilayahan, maupun antara satuan kewilayahan dengan satuan kewilayahan yang di atasnya.

Hal yang sama juga terjadi pada koordinasi antar instansi, terutama antara Polri dengan Dinas Pariwisata. Tabel menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan tidak ada kendala dalam koordinasi antar instansi terkait dalam pengamanan wisata. (Tabel 16)

Walaupun tidak ada kendala dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait, namun di beberapa daerah koordinasi itu belum dilaksanakan dengan baik. Hal itu terbukti pada kecenderungan setiap instansi berjalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan kegiatan di tempat wisata, baik itu berkaitan dengan masalah penertiban maupun pengamanan.

8. Kesimpulan

1) Kondisi keamanan.

- a). Kondisi keamanan di daerah wisata, khususnya di tempat - tempat wisata umumnya sudah cukup baik (57,61 %). Kondisi keamanan yang cukup baik itu dikarenakan karena adanya kesadaran yang cukup tinggi dari para

pengunjung wisata, untuk memelihara keamanan dan ketertiban. Selain itu partisipasi masyarakat sekitar lokasi wisata dan Pernda juga ikut berpengaruh bagi terwujudnya kondisi keamanan ditempat wisata tersebut.

- b). Kendati kondisi keamanan di daerah wisata umumnya sudah cukup baik, namun bukan berarti tidak ada gangguan keamanan. Secara umum gangguan keamanan itu terwujud pada adanya pencopetan, terutama pada saat ramai pengunjung, keberadaan pedagang asongan yang masih kurang tertib, sopir angkutan umum yang nakal, dan pemalakan di jalan yang menuju lokasi wisata sebanyak (3,84 %).

2) Upaya peningkatan keamanan.

- a) Beberapa upaya telah dilakukan oleh Polri untuk mengamankan daerah wisata, mulai dari kedatangan wisatawan di wilayahnya, tempat menginap, lokasi wisata, sampai dengan kembalinya wisatawan ke daerah asal mereka. Untuk menjaga keamanan wisatawan di lokasi kedatangan dan kepulangan, Polri menempatkan petugas mereka di pelabuhan dan di bandara

yang dalam prakteknya Polri melakukan koordinasi dengan satpam pelabuhan dan bandara, dan pihak - pihak yang terkait dengan pengamanan di dua wilayah itu. Termasuk pengamanan wisatawan di hotel-hotel pihak Polri berkoordinasi dengan Satpam Hotel, sementara Polri hanya menetapkan standar pengamanan yang harus dipenuhi oleh pihak hotel dan pelaksanaannya selalu dimonitor oleh Polri.

- b) Untuk lokasi yang banyak dikunjungi wisatawan, Polri menempatkan Pos Polisi berikut petugasnya untuk menjaga keamanan para pengunjung ditempat wisata sebanyak (75,94 %). Sedangkan untuk lokasi yang kurang dikunjungi oleh wisatawan, pengamanan cenderung dilakukan dengan sistem patroli. Pengamanan di lokasi wisata umumnya masih dilakukan oleh satuan Sabhara dan juga Babinkamtibmas kecuali di wilayah Polda Bali, yang lebih banyak dilakukan oleh Polisi Pariwisata. Akan tetapi, itu-pun masih terbatas untuk lokasi yang banyak dikunjungi wisatawan. Sedangkan lokasi yang kurang banyak dikunjungi, peng-

amanan masih dilakukan oleh petugas Pos Polisi yang anggotanya adalah dari Samapta.

- c) Anggota Polri yang bertugas di lokasi wisata idealnya adalah memahami kondisi kepariwisataan dengan baik. Polisi Pariwisata, yang diberi pendidikan tentang permasalahan yang terkait dengan kepariwisataan. Selain itu, pengamanan oleh Polisi Pariwisata dianggap lebih tepat, karena kesan keramahan yang ditampilkan oleh Polisi Pariwisata dianggap lebih menonjol, terkait dengan pakaian seragam yang dikenakannya. Dengan demikian di setiap daerah diharapkan terdapat Polisi Pariwisata, yang keberadaannya bukan hanya di Polda melainkan juga sampai disetiap Polres, yang ada daerah wisatanya.

3) Kendala

- a) Dalam pengamanan wisata. Polri masih kekurangan personel, demikian juga keahlian dalam pemahaman tentang kepariwisataan para petugas juga belum memadai. Di sisi lain kemampuan bahasa asing umumnya juga belum dimiliki. Padahal, untuk melakukan pengamanan di tempat - tempat pariwisata

ta yang banyak dikunjungi oleh wisatawan manca negara, kemampuan bahasa asing itu sangat penting, agar mereka dapat melayani pengunjung pariwisata dengan baik.

- b) Selain itu juga, sarana dan prasarana yang dimiliki umumnya juga masih kurang, Alat komunikasi masih sangat terbatas, begitu pula kendaraan patroli umumnya juga sangat minim, mobil untuk patroli hanya 35,94 % sehingga banyak anggota yang patroli keempat pariwisata dengan kendaraan pribadi.
- c) Masih ada beberapa bandara yang menggunakan fasilitas TNI, sehingga pengamanan terhadap para wisatawan pun masih dibawah kendali TNI,

9. Rekomendasi

Walaupun kondisi keamanan di daerah wisata umumnya sudah cukup baik, namun upaya peningkatan pengamanan di daerah wisata masih perlu dilakukan. Untuk itu beberapa hal perlu dilakukan oleh Polri:

1. Segera dibentuk Polisi Pariwisata di Polda dan jajarannya yang mempunyai daerah wisata dengan kegiatan wisatanya cukup berkembang, untuk itu para anggota yang ditugaskan di pos Polisi yang

mengamankan tempat-tempat wisata sebaiknya diangkat menjadi Polisi Pariwisata, adapun Polisi Pariwisata yang dibentuk perlu diberikan pengetahuan kepariwisataan dan ketrampilan yang memadai.

2. Setiap Pos Polisi yang ada di tempat wisata, diharapkan agar anggotanya terdiri dari Polisi Pariwisata. Dengan ditempatkannya Polisi Pariwisata untuk melakukan pengamanan di tempat - tempat wisata, diharapkan mereka dapat melayani wisatawan dengan lebih baik, karena sebagai Polisi Pariwisata mereka diharapkan tidak hanya menjaga kondisi Kamtibmas di sekitar lokasi wisata, melainkan dapat berfungsi sebagai pemandu wisata.
3. Perlu ditingkatkan kerja sama antar Polri, Pemda dan instansi terkait untuk meningkatkan keamanan di tempat wisata dan sekitarnya.
4. Perlu ditingkatkan kemampuan berbahasa asing dan penambahan sarana dan prasarana untuk lebih mengoptimalkan petugas dalam pengamanan di lokasi wisata.
5. Perlu peningkatan koordinasi antara Polri setempat dengan pihak TNI yang melakukan pengamanan bandara yang bersangkutan dalam rangka pengamanan kedatangan dan kepulangan para wisatawan.

SOROT LITBANG

Sesro LITBANG saat presentasi kapal cepat kelas "B" produk China Shipbuilding Trading Co. (CSTC) yang diajukan PT. INDADI SETIA.

